



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENY SULISTYANINGSIH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
3. NHK : 801674

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.180.000.000**

1. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 980.000.000
2. Tanah Seluas 207 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 2494 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 111.000.000**

1. MOTOR, HONDA GLP III SPORT Tahun 1996, HADIAH Rp. 8.500.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2014, HADIAH Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA ATT1121B01 A/T Tahun 2015, HADIAH Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA H5CO2R20MZ M/T Tahun 2016, HADIAH Rp. 13.000.000
5. MOBIL, ISUZU TBR 541 TOURING Tahun 2001, LAINNYA Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	47.200.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	47.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.385.400.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.385.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.